

## PLURALITAS EKONOMI MASYARAKAT PESISIR KAJIAN PADA DESA PESISIR MUNCAR BANYUWANGI

EMMA YUNIKA PUSPASARI

---

### ABSTRAK

*Paradigma pluralisme ekonomi, paradigma kualitatif-interpretative, strategistudi kasus, dan wawancara naratif diterapkan dalam penelitian ini di dalam merekonstruksisecara konseptual pluralitas ekonomi masyarakat pesisir desa Muncar Banyuwangi. Kehidupan masyarakat pesisir Muncar telah meredefinisi eksistensi perekonomian pesisir secara evolutif. Masyarakat pesisir ini mempunyai tipologi yang berbeda dengan ruang-ruang yang menyanggah genius loci (kearifan lokal) yang menjadi identitas lokal. Kelompok masyarakat tersebut memiliki budaya ekonomi yang berbeda yang dipengaruhi oleh pranata dan norma, power structure, tacit knowledge masyarakat terhadap lingkungan pesisir dan laut, hal itu mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut telah menjadi bagian masyarakat yang pluralistik tapi masih tetap memiliki budaya kebersamaan, artinya struktur masyarakat pesisir ini merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan yang multi etnis. Pluralisme nilai-nilai sosial, spiritual transenden, nilai sosiologis, budaya ekonomi telah menciptakan akulturasi dalam tatanan kehidupan masyarakat pesisir. Struktur masyarakat yang plural ini membentuk sistem nilai yang membentuk kelembagaan lokal masing-masing komponen dalam struktur masyarakatnya. Lima perspektif orientasi Pasal 33 UUD 1945 digunakan sebagai proksi dalam merekonstruksi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Muncar yang ditujukan dalam pengembangan strategi kapasitas kelembagaan lokal masyarakat pesisir*

**Kata kunci :** *Pluralitas ekonomi masyarakat pesisir Muncar, kelembagaan lokal pesisir, pemberdayaan ekonomi dalam perspektif Pasal 33 UUD 1945*

---

### LATAR BELAKANG

Berbicara mengenai pluralisme sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada masa reformasi bergulir muncul istilah pluralisme yang menjadi salah satu ikon masyarakat untuk menyatakan perhatian dan penekanan terhadap perlu ya pengakuan keberagaman di Indonesia yang dikenal dengan istilah demokrasi. Pluralitas sudah menjadi bagian corak Indonesia bahkan sebelum era kejayaan majapahit yang dibuktikan dengan tan amukti palapa penyatuan nusantara. Hal inilah yang mengingatkan kita pada lahirnya semboyan

Bhinneka Tunggal Ika yang terpampang melengkung pada sehelai pita yang dicengkram kedua kaki burung garuda lambang negara RI. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak jaman Kerajaan Majapahit juga sudah dipakai sebagai motto pemersatu Nusantara, yang diikrarkan oleh Patih Gajah Mada dalam Kakawin Sutasoma, karya Mpu Tantular yang berbunyi *bhinnêka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa*. Frasa tersebut berasal dari bahasa sansekerta dan diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap

Alamat Korespondensia:

Emma Yunika Puspasari, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

E-mail : Thefortune.Emma@gmail.com

satu. Ini artinya, bahwa sudah sejak dulu hingga saat ini kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh menjadi semangat bangsa di negeri ini.

Bertolak dari lingkup pluralitas secara umum, sebenarnya pluralitas akan menghantarkan kita kepada makna yang mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial dan ekonomi jika mencermati pembangunan yang selama ini digalakkan cenderung *Economic oriented*, dengan mengabaikan fakta sosial keberagaman masyarakat Indonesia. Negara seakan berasumsi bahwa bila pembangunan ekonomi dapat diakselerasi, maka dengan sendirinya masyarakat akan semakin toleran dan terhindar dari konflik yang berbasis SARA. Nyatanya, belum dewasanya masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap toleransi dan pluralisme, justru akan menghambat pembangunan yang sedang berlangsung jika setiap elemen bangsa dapat bersinergi, maka proses pembangunan akan terakselerasi dengan sendirinya. Tidak boleh ada pengabaian terhadap kelompok-kelompok minoritas untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan agar dapat mewujudkan Indonesia yang *gemah ripah loh jinawi tata tentrem kertorahardjo*. Hal inilah yang seharusnya menghantarkan Indonesia menuju perekonomian yang bercirikan demokrasi, sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia yang berpihak pada kemakmuran rakyat, dimana negara lebih dituntut peranannya, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, *suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi*. Lima prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) *Perekonomian disusun*

*sebagai usahabersama berdasar atas asas kekeluargaan*”, “(2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*”, “(3) *Bumidan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”, “(4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional*”, “(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang*. Berdasarkan kelima prinsip tersebut tersirat betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi Indonesia. Struktur dasar pembangunan itulah yang menjadi landasan perekonomian Indonesia.

Di Indonesia Pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat sebenarnya telah ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumberdaya alam khususnya sumberdaya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan juga harus mampu mewujudkan keadilan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir serta memajukan desa-desa pantai.

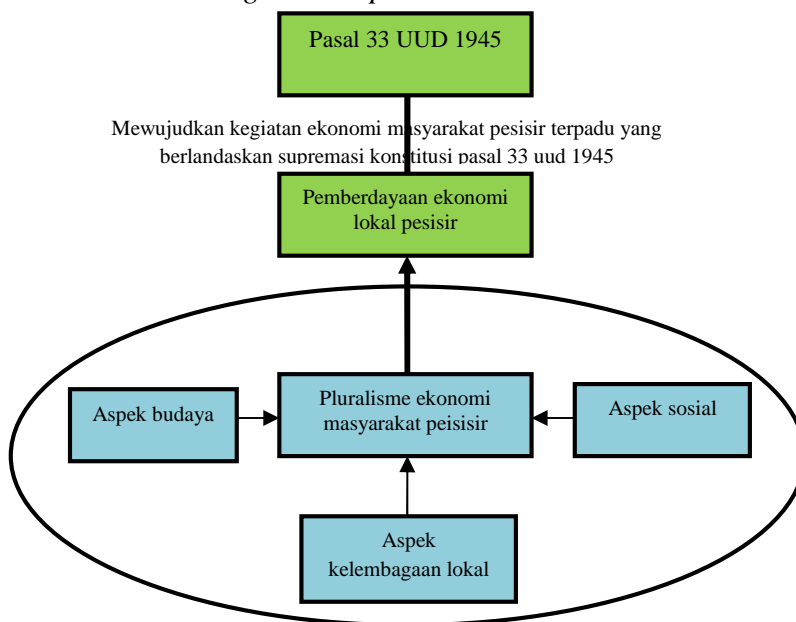
Dalam Implementasinya, pola pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang selama ini sangat bertentangan dengan apa yang telah digariskan dalam pasal tersebut, pelaksanaannya masih bersifat *top down*, artinya semua kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan mulai dari membuat kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal, padahal apabila dilihat karakteristik wilayah pesisir dan lautan baik dari segi sumberdaya alam maupun dari masyarakatnya sangat kompleks dan beragam, sehingga dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan seharusnya secara langsung melibatkan masyarakat lokal. Atas dasar tersebut dan dengan adanya kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang Otonomi Daerah dan desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan, maka sudah semestinya bila pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara langsung melibatkan partisipasi masyarakat lokal baik dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, sehingga mampu menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat lokal serta kelestarian pemanfaatan sumberdaya pesisir tersebut. Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay, 2005). Lebih jauh, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat

produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia (Kay 2009). Di masa lalu, paradigma pembangunan lebih memprioritaskan masyarakat perkotaan dan pertanian pedalaman, sedangkan masyarakat pesisir kurang diperhatikan. Sudah saatnya memang paradigma tersebut dirubah dengan memberikan perhatian yang sama terhadap masyarakat pesisir karena mereka juga adalah warga negara Indonesia. Konsekuensinya, justru masyarakat pesisir perlu mendapatkan perhatian khusus karena ketertinggalan mereka akibat paradigma masa lampau. Sebenarnya yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir. Karenanya, arah kebijakan sekarang ini untuk pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan dan pendampingan selama beberapa waktu.

Berkaitan dengan masalah pluralitas dalam pemberdayaan kawasan pesisir salah satunya adalah desa pesisir Muncar banyuwangi yang selama lebih dari dasawarsa terakhir menjadi tonggak utama daerah penghasil ikan tangkap dan pengolah ikan akan tetapi lambat laun identitasnya sebagai daerah penghasil ikan mulai pudar. Kecamatan Muncar berada di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan kabupaten paling ujung timur Propinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 5.782,50 km dengan panjang garis pantai 291,5 km dan menyimpan potensi sumber daya pesisir yang cukup besar dan beragam. Ini mengindikasikan bahwa kawasan pesisir Muncar memiliki potensi pesisir yang besar khususnya potensi perikanan. Ekonomi masyarakat pesisir muncar banyuwangi didominasi oleh aktivitas nelayan. Kelompok nelayan muncar

merupakan bagian multi etnis yang mempunyai sosial dan budaya berbeda. Pluralisme ekonomi masyarakat pesisir adalah keberagaman filosofis dan aktivitas ekonomi perikanan nelayan muncar. Pluralisme ini dilihat dari tiga sudut pandang yang pertama dinamika sosial, dinamika budaya dan aspek kelembagaan. Pluralisme ekonomi masyarakat pesisir sebagai sarana untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terpadu

yang berlandaskan supremasi konstitusi pasal 33 UUD 1945. Tulisan singkat ini bermaksud menguraikan tentang arah tantangan bidangnya pertanian dan perikanan/ nelayan, pentingnya perantara dan pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan kecil. Secara khusus kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut



Sumber: artikulasi oleh peneliti

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan berparadigma *interpretative*. Penelitian fenomenologi sendiri termasuk pada paradigma *interpretative*. Metode-metode penelitian yang ada dalam paradigma *interpretative*, menganalisis aktivitas sosial melalui pengamatan langsung yang mendetail atas individu didalam situasi dan kondisi yang alami dengan tujuan untuk mencapai pemahaman dan penafsiran bagaimana

individu menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka. Oleh karena itu asumsi utama dari paradigma *interpretative*, bahwa individu secara aktif menginterpretasikan pengalaman mereka dengan memberikan makna pada apa yang mereka lihat atau rasakan. Oleh karena paradigma *interpretative* percaya bahwa setiap individu melakukan interpretasi secara aktif, dan fenomenologi percaya bahwa pengetahuan didapatkan dari “*conscious experience*”, dan bagaimana individu memaknai segala sesuatu tergantung

pada arti sesuatu tersebut dalam kehidupan individu (subyektif), maka peneliti fenomenologi tidak pernah mencari benar-salah dari pengalaman respondennya bahkan membenarkan atau menyalahkan pernyataan respondennya, tetapi peneliti fenomenologi berusaha mengejar bagaimana pengetahuan tersebut didapatkan respondenya atau bagaimana pernyataan tersebut bisa dikemukakan oleh respondennya. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan, sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat bantu berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian namun berfungsi sebagai instrumen pendukung.

Data dalam penelitian ini bersumber dari orang-orang, peristiwa-peristiwa dan situasi yang ada pada latar penelitian. Informan kunci adalah nelayan pesisir muncar banyuwangi, artefak yang digunakan adalah foto aktivitas nelayan di laut, aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di pasar pelelangan ikan dan kegiatan produksi maupun pengolahan ikan segar mulai dari industri rumahan hingga pabrik skala besar. Penelitian ini menggunakan tiga teknis pengumpulan data yaitu (1) wawancara mendalam (*in depth interview*), (2) observasi, (3) studi dokumen (*study of documents*). Ketiga teknik ini dilakukan sangat tergantung dengan situasi yang ada. Ada kalanya peneliti langsung masuk pada latar penelitian dengan melakukan observasi kemudian hasil observasi diperdalam dan dipertajam dengan wawancara dan studi

dokumen. Kadang-kadang dimulai dari studi dokumen terlebih dahulu kemudian diperjelas dengan wawancara dan observasi.

Analisis data pada penelitian ini pada dasarnya telah dimulai pada saat peneliti memasuki latar penelitian bahkan ketika menelaah data yang tersedia. Secara umum proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber: pengamatan dan wawancara yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, transkrip rekaman wawancara, dokumen pribadi dan foto. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan dua teknik analisis yaitu teknik *constant comparison* yaitu membandingkan kekonsistenan (tetap) antar setiap jawaban yang diberikan dari satu responden dan *case cross comparison* yaitu membandingkan jawaban antar responden dengan responden lainnya. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan keabsahan data disusul dengan penafsiran dan pemaknaan dari data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi teknik analisis fenomenologi dari Van Kaam (Moustakas, 1994): ***Listing and Preliminary Grouping*** dengan cara mendaftar semua ekspresi yang relevan dengan pengalaman yaitu daftar jawaban partisipan atau responden penelitian (*horizon-lization*). ***Reduction and Elimination*** dengan cara menguji setiap ekspresi yang ada dengan dua persyaratan berikut: Apakah ekspresi tersebut mengandung momen pengalaman yang penting dan mengandung unsur pokok yang cukup baik untuk memahami fenomena, Apakah ekspresi tersebut memungkinkan untuk dikelompokkan dalam suatu kelompok be-

sar dan diberi label. *Clustering and Thematizing the Invariant Constituents (Thematic portrayal)* merupakan pengalaman responden penelitian yang berkaitan kedalam label-label tematik. *Constituent* (unsur pokok) yang dikelompokkan dan diberi label ini adalah tema inti dari pengalaman. Jadi tema-tema yang ada pada *thematic portrayal* adalah benang merah dari jawaban-jawaban semua responden. *Final Identification of the Invariant Constituents and Themes by Application: Validation* dengan cara proses memvalidkan *Invariant Constituent*. yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengecek *invariant constituent* dan tema yang menyertainya terhadap rekaman utuh pernyataan responden penelitian. *Individual Textural Description* dengan menggunakan *invariant constituent* dan tema yang valid dan relevan dari tahap sebelumnya, dapat disusun *Individual Textural Description* dari pengalaman setiap responden penelitian. Termasuk didalamnya adalah ekspresi harfiah (kata per kata) dari catatan interview yang ada. *Individual Structural Description* hasil dari penyusunan *Individual Textural Description* dan *Imaginative Variation* akan membangun *Individual Structural Description* dari pengalaman setiap responden penelitian. *Textural-Structural Description* Tahap ini merupakan proses penggabungan antara *Textural Description* dan *Structural Description* dari pengalaman masing-masing setiap responden penelitian. Setelah *Individual Textural – Structural Description* tersusun maka dibuat suatu *Composite Description* dari makna dan esensi pengalaman sehingga menampilkan gambaran pengalaman kelompok secara satu kesatuan. Kemungkinan

akan adanya data baru dalam penelitian mengharuskan adanya keterbukaan dalam analisis data. Proses analisis data penelitian ini dilakukan secara terus menerus (*cyclical*) sejak peneliti memasuki lapangan sampai kegiatan penelitian ini berakhir.

Validasi terhadap hasil penelitian perlu dilakukan dalam upaya memperoleh kredibilitas hasil penelitian, antara lain: (1) Prolongation of time penelitian untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak, (2) Triangulasi merupakan upaya untuk melihat fenomena dari beberapa sudut, melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan teknik (3) *Member check* dimana peneliti mengecek kebenaran data dengan cara mengembalikan data tersebut kepada sumber data untuk diperiksa kebenarannya. (4) *Audit trail* merupakan pemeriksaan terhadap kesesuaian temuan penelitian dengan data lapangan melalui pelacakan terhadap catatan-catatan lapangan, metode pengumpulan data dan teknik analisisnya. (5) *Expert Opinion* dilakukan dengan cara meminta tanggapan dari para ahli dan praktisi. Dalam konteks ini, peneliti menempatkan dosen pakar sebagai ahli. Melalui pembimbingan, seminar-seminar dalam proses penyusunan ini, banyak masukan yang bersifat memperkuat validitas temuan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui wawancara mendalam, peneliti mendapatkan informasi seputar karakteristik ekonomi masya-

rakat nelayan dan pengolah ikan di muncar banyuwangi

#### A. Tipologi kawasan pesisir Muncar

Wilayah kecamatan muncar sebagian besar merupakan wilayah pesisir. Wilayah di Kecamatan muncar terdapat 10 desa, yaitu Desa Blambangan, Desa Kedungrejo, Desa Kedungringin, Tembokrejo, Sumber-beras, Wringin putih, Kumendung, Tapanrejo, Sumber-sewu, Tambakrejo. Di antara kesepuluh desa tersebut, pada tahun 2012 jumlah penduduknya yang terbesar adalah Desa Kedungrejo, Kecamatan Sranadakan, yaitu tercatat sebanyak 14.269 jiwa. Sedangkan desa yang jumlah penduduknya terendah adalah Desa Kumendung, yaitu sebesar 4.901 jiwa.

Di kecamatan Muncar, daerah kawasan pesisir yang utama dan

merupakan pusat kegiatan perikanan pelabuhan adalah desa Kedungrejo dengan hinterland desa Tembokrejo. Kegiatan budidaya ikan dan penangkapan ikan di desa ini sudah sejak lama dilakukan dan rurun temurun, dari catatan sejarah diperoleh sejak kedatangan komunitas madura di wilayah pesisir ini sekitar tahun 1901. Daerah operasional penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan didesa ini tidak jauh berbeda dengan nelayan di desa lainnya di kecamatan Muncar, termasuk juga dalam hal ini sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dimilikinya. Namun demikian, kelembagaan nelayan yang terwadahi dalam kelompok nelayan sudah terwadahi dengan organisasi yang mereka bentuk dan diberi nama patembayan nelayan pesisir Kedungrejo yang beranggotakan sekitar 109 orang.

*gambar 2 .peta kecamatan Muncar Banyuwangi*



Sumber : wikimapia Indonesia

## B. Dinamika sosial budaya masyarakat pesisir muncar banyuwangi

Kondisi Eksisting Masyarakat Pesisir Muncar terdiri dari beragam etnis, beberapa diantaranya yang merupakan komunitas masyarakat pesisir Muncar adalah suku Madura, Osing, Jawa dan etnis Tionghoa

### a. Anatomi budaya ekonomi nelayan madura di kawasan pesisir muncar

Masyarakat madura ada-lah komunitas yang paling dominan di kawasan pesisir muncar. Di kawasan pesisir muncar ini masyarakat madura bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan pesisir ini terbagi menjadi nelayan nelayan pemilik (jurangan), nelayan penggarap (buruh/pekerja) nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan *gendong* (nelayan angkut), dan perusahaan/ industri penangkapan ikan. Dalam tradisinya mereka sangat memegang tekuk hukum adat dan kepercayaan leluhurnya, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya upacara petik laut tiap bulan Muharam atau Syuro dalam penanggalan Jawa, nelayan pesisir Muncar meng-gelar ritual untuk memohon berkah rezeki dan keselamatan. Waktu pelaksanaan petik laut tiap tahun berubah karena berdasarkan penanggalan Qa-mariah dan kesepakatan pihak nelayan. Biasanya digelar saat bulan purnama, karena nelayan tidak melaut, mengingat pada saat itu terjadi air laut pasang. Tujuan utama diadakannya ritual petik laut adalah untuk untuk memohon berkah rezeki dan keselamatan sekaligus ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Di Muncar ritual ini berkembang setelah kehadiran warga Madura yang terkenal sebagai pelaut. Tak mengherankan, jika petik laut selalu dipenuhi ornamen suku

Madura. Salah satunya, seragam pakaian Sakera, baju hitam dan membawa clurit, simbol kebesaran warga Madura. Masyarakat ini mem-punyai kepercayaan pada hal supranatural. Tradisi adat yang berhubungan dengan alam sangat kental dengan aktivitas mereka saat melaut. Mereka mengenal musim yang tepat dan hari baik dalam melaut. Terlebih nelayan yang mau melaut mereka harus melihat hari baik terlebih dahulu. Masyarakat Madura di pesisir muncar terkenal dengan kekhasan dan keunikan nilai-nilai budaya. Penggunaan isti-lah khas menunjuk pada pengertian bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan-kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas etnik lain. Kekhususan kultural itu tampak antara lain pada ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka secara hierarkis kepada empat figur utama dalam berkehidupan, lebih-lebih dalam praksis pluralitas. Keempat figur itu adalah *Buppa'*, *Babbu*, *Guru*, dan *ban Rato* (ayah, ibu, guru, dan pemimpin/pemerintah). Masyarakat etnik Madura, mempunyai filosofi ekonomi sebagai pekerja keras, tercerminkan dalam peribahasanya: *Abantal ombak asepo angen* (berbantalan ombak berselimut angin). Filosofi ini bagi kaum madura di pesisir muncar dipegang sebagai bentuk dorongan kuat dalam melaut, apabila sudah berlayar mencari ikan di laut, pantang bagi mereka untuk kembali tanpa membawa hasil ikan, hal inilah yang membuat adanya bentuk kepatuhan dan kepercayaan akan hari baik dalam melaut, mereka percaya bahwa hari baik akan menentukan hasil perolehan ikan yang lebih banyak.



b. Anatomi budaya ekonomi nelayan Osing di kawasan pesisir Muncar

Masyarakat Osing adalah suku asli banyuwangi, Osing merupakan salah satu komunitas sub-etnis Jawa. Sebenarnya salah satu pusat komunitas Osing adalah Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi-Jawa Timur, di kawasan pesisir muncar sendiri jarang ditemukan keberadaan suku using. Kebanyakan dari mereka yang menetap di kawasan pesisir memilih menjadi nelayan dan buruh pabrik pemindangan maupun cold storage. Tak ada satupun keturunan Osing yang mendominasi perekonomian lokal kawasan pesisir ini, kebanyakan dari mereka lebih cocok di bidang pertanian seperti yang tersebar di desa Kemaren yang secara topografi merupakan daerah landai yang cocok untuk pertanian. Masyarakat osing ini juga ikut membaur dengan komunitas lainnya dalam menjalankan aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Beberapa dari mereka juga ikut paguyuban nelayan muncar yang dikenal dengan paguyuban nelayan kedungrejo. Dalam mencari ikan di laut mereka lebih banyak mengandalkan peralatan tradisional dan melaut berdasarkan sisitem musim. masyarakat osing juga ikut andil dalam perayaan ritual dalam upacara petik laut yang diadakan tiap setahun sekali di pesisir ini. Mereka percaya jika upacara tidak diadakan maka hasil tangkapan ikan akan menurun dan terjadi musim paceklik ikan.

c. Anatomi budaya ekonomi masyarakat Jawa di kawasan pesisir Muncar

Masyarakat Jawa dapat dilihat keberadaan aktivitasnya di kawasan

pesisir Muncar ini tetapi tidak sebanyak komunitas Madura melainkan lebih banyak bila dibandingkan keberadaan suku Osing. Masyarakat ini hidup secara berkelompok dan membaur dengan komunitas madura maupun Osing. Di kawasan pesisir tersebut, mereka lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan pengolah ikan dan mendirikan home industri pemindangan. Masyarakat jawa di kawasan ini filosofi ekonomi dalam peribahasa Jawa *Rame ing gawe sepi ing pamrih* ( Ramai dalam bekerja, sepidalam pamrih) kita bisa mengetahui bahwa orang Jawa diharapkan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya banyak bicara. Selain itu, dalam bekerja hendaknya kita tidak banyak pamrih, bekerja harus dengan keikhlasan, tidak bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

d. Anatomi budaya ekonomi etnis Tionghoa di kawasan peisir Muncar

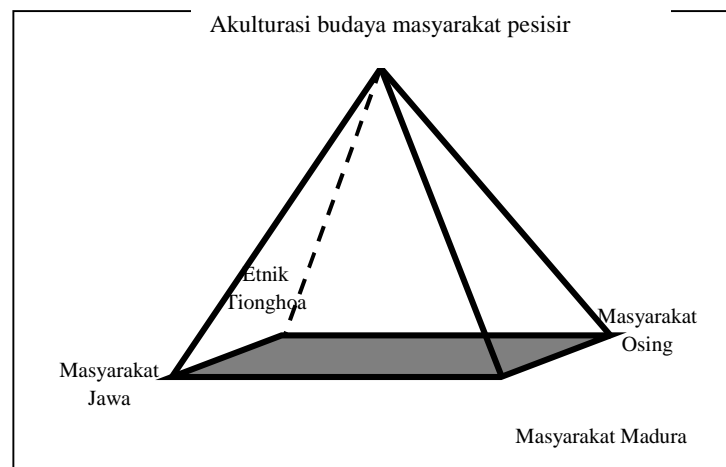
Komunitas tionghoa juga ikut andil dalam menggerakkan perekonomian lokal kawasan muncar, hanya saja jumlah etnis ini tidak sebanyak jumlah etnis madura maupun Jawa, meskipun jumlahnya relatif sedikit akan tetapi tonggak kegiatan ekonomi perikanan berskala besar lebih banyak didominasi oleh etnis tionghoa. Seperti pabrik pengolahan ikan, cold storage dan perusahaan pengalengan ikan. Etnis Tionghoa merupakan masyarakat pendatang dan merupakan penguasa bisnis pengolahan ikan di kawasan pesisir ini. Dalam berbisnis etnis Tionghoa yang mendiami kawasan pesisir Muncar ini memegang peribahasa "*Liang Ru Er Chu*" yang artinya pengeluaran disesuaikan dengan pemasukan, selain itu dalam menjalankan roda

ekonomi lokal di kawasan pesisir tersebut kunci keberhasilan menurut mereka adalah selalu berusaha menjaga kepercayaan pelanggan ataupun rekan bisnisnya, selain itu yang menjadi kunci sukses orang Tionghoa dalam berbisnis adalah menggunakan kebaikan hati atau jujur. Kehidupan sehari-hari orang Tionghoa di kawasan pesisir ini diliputi oleh *stereotype*, prasangka dan diskriminasi di seputar sosio-ekonomi masyarakat pesisir. Apabila bertemu seorang Tionghoa dengan atribut (pakaian) kelas menengah ke atas, oleh masyarakat lokal dipanggil *Bos* atau *Cukong*, apapun situasi faktualnya. Lebih jauh lagi di tengah pluralitas budaya masyarakat pesisir Muncar ini, etnis Tionghoa juga ikut tergabung dalam

perkumpulan/ organisasi masyarakat pengolah ikan hasil tangkap.

Sebenarnya masyarakat pesisir Muncar telah menjadi bagian masyarakat yang plura-listik tapi masih tetap memiliki budaya kebersamaan, artinya struktur masyarakat pesisir ini merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan yang multi etnis. Struktur masyarakat yang plural ini membentuk sistem nilai yang merupakan akulturasi sosial dan budaya dari masing-masing komponen dalam struktur masyarakatnya. Berikut gambar akulturasi budaya dan sosial yang masyarakat pesisir muncar dalam aktivitas ekonomi di sektor perikanan laut yang diilustrasikan pada gambar berikut

Gambar 3. akulturasi budaya kawasan pesisir Muncar



Sumber :artikulasi oleh peneliti

### C. Dinamika sosial masyarakat pesisir Muncar

Lebih jauh, menelusur karakteristik sosial masyarakat nelayan pesisir Muncar dapat juga dilihat darimaupun perilaku transendentalnya. Pada masyarakat nelayan, pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan umumnya didapat dari warisan orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan

pengalaman empiris. Kuatnya pengetahuan lokal tersebutlah yang selanjutnya menjadi salah satu faktor penyebab terjaminnya kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan. Dengan kata lain, pengetahuan tradisional nelayan terhadap lingkungan hidupnya cukup tinggi, namun karena belum dilengkapi pengetahuan modern tentang dunia luar, maka kebanyakan nelayan

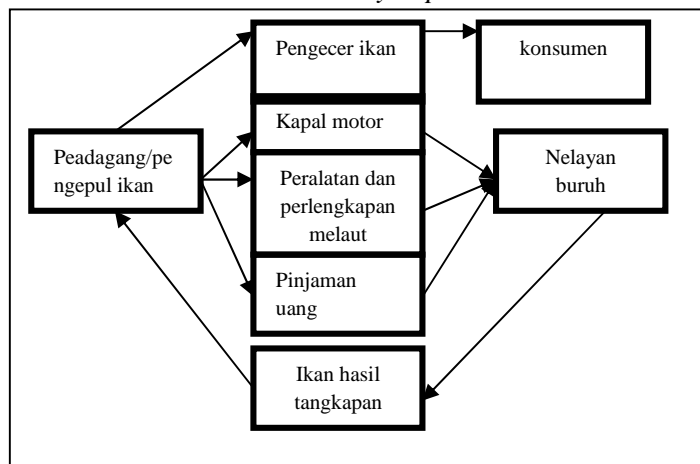
kurang mampu memanfaatkan peluang pe-luang yang tersedia dibandingkan masyarakat miskin lainnya. Berangkat dari pengetahuan tradisional ter-sebut, secara theologis ternyata nelayan yang berada di pesisir Muncar masih memiliki kepercayaan yang kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis sehingga mereka mempercayai perlunya perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan akti-vitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakinterjamin. Tradisi tersebut antara lain terlihat pada masyarakat pesisir Muncar, yakni terdapatnya peranan “Sesepuh adat” dalam mengadakan petik laut yang diadakan setahun sekali (tiap bulan muharam). Ritual diawali pembuatan sesaji oleh sesepuh nelayan. Mereka adalah keturunan warga Madura yang sudah ratusan tahun turun-temurun mendiami pelabuhan pesisir Muncar. Disiapkan perahu kecil (perahu sesaji) dibuat mirip kapal nelayan yang biasa digunakan melaut. Pada malam harinya, di tempat perahu untuk sesaji dipersiapkan dilakukan tirakatan. Di beberapa surau atau rumah diadakan pengajian atau semaan sebelum perahu sesaji dilarung ke laut. Pada hari yang ditentukan, ratusan nelayan berkumpul di rumah sesepuh adat dengan menggunakan baju khas Madura. Menjelang siang, sesaji diarak menggunakan dokar menuju pantai. Tujuan utama diadakannya ritual petik laut adalah untuk memohon berkah rezeki dan keselamatan sekaligus ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Sesepuh adat selain berjasa dalam mempersiapkan upacara-upacara adat juga memberikan pengobatan apabila ada orang sakit karenagangguan di laut dan berperan mengatur alat

tangkap bagi nelayan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan penyelesaian konflik diantara nelayan. Namun demikian, keberadaan sesepuh adat ini dapat menjadi pintu masuk (*entry point*) atau wahana dalam pengorganisasian masyarakat nelayan untuk tujuan perlindungan sumberdaya pesisir dan laut. Hal penting lainnya adalah status sosial nelayan baik secara kultural maupun struktural. Potensi sosial yang ada pada masyarakat nelayan adalah dalam hal sifat kerjasama dan solidaritas. Hubungan sosial diantara nelayan dapat diamatidari kegiatan penangkapan ikan yang memerlukan koordinasi diantara para awak dalam menghadapi resiko fisik lingkungan laut, hal ini akan menanamkan pentingnya kerjasama yang erat diantara nelayan. Problematika paling utama dalam masyarakat nelayan di wilayah pesisir Muncar adalah berkaitan dengan struktur sosialnya yang cenderung mengarah pada terjadinya polarisasi sosial (struktur masyarakat desa dua kelas). Masyarakat desa tipe dua kelas ini, garis besar digambarkan sebagai desa nelayan yang di dalamnya terdapat sejumlah kecil warga yang memiliki alat produksi dan sumberdaya keuangan yang cukup banyak, dan selebihnya, dalam jumlah besar, merupakan nelayan kecil yang tidak memiliki alat produksi dan sumberdaya ke-uangan. Akibat dari terjadinya polarisasi sosial seperti ini, mengakibatkan terjadinya ketergantungan yang sangat kuat bahkan eksploitasi, nelayan kecil kemudian terjebak pada kemiskinan dan mendorong terjadinya keru-sakan lingkungan hidup yang lebih parah. Di wilayah pesisir Muncar, struktur

yang demikian itu sangat jelas, nelayan kecil yang berlatar belakang etnik Osing dan Madura dan etnik lokal lainnya berperan sebagai anggota masyarakat desa kelas bawah, memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap alat produksi penangkapan ikan yang dimiliki sekelompok kecil masyarakat kelas atas yang pada umumnya beretnik campuran Madura-Jawa serta etnik Tionghoa.

Peran masyarakat kelas atas ini sangat dominan, tidak hanya sebagai pemilik alat produksi penangkapan ikan, melainkan pula sebagai pedagang pengumpul ikan dan pedagang berbagai kebutuhan rumah tangga nelayan yang hidup disekitarnya. Secara skematik, hubungan antar pelaku dalam struktur sosial masyarakat desa nelayan tersebut dapat diilustrasikan pada Gambar di bawah ini

Gambar 4. Struktur sosial nelayan pesisir Muncar



#### D. Aspek kelembagaan lokal masyarakat pesisir muncar banyuwangi

Pembahasan tentang nelayan pesisir Muncar dalam tataran realitas berdasarkan hasil pengamatan peneliti, nelayan pesisir Muncar ini dibedakan menjadi nelayan pemilik (juragan), nelayan penggarap (buruh/pekerja), nelayan kecil atau nelayan tradisional, nelayan *gendong* (nelayan angkut), dan perusahaan/industri penangkapan ikan. Aktivitas melaut merupakan suatu tradisi lama dan turun temurun dalam kegiatan perekonomian masyarakat pesisir Muncar, disini terdapat kelembagaan ekonomi lokal nelayan diwujudkan dalam bentuk pengaturan formal. Dalam konteks praktis, di muncar

paguyuban lokal nelayan kedungrejo ditandai dengan penguatan asosiasi koperasi nelayan yang berbasis pada komunalitas yang tumbuh secara alami melalui kegiatan-kegiatan gotong royong diantara masyarakat. Basis utama penguatan model koperasi seperti ini adalah adanya sikap egalitarianisme dan saling kepercayaan (*trust*) diantara anggotanya. Melalui modal inilah kemudian asosiasi nelayan tumbuh dan berkembang menjadi koperasi nelayan kedungrejo yang mengangkat pengurus secara demo-kritis melalui rembuk kelompok. Kelembagaan lokal disini juga dicirikan adanya patembayan atau paguyuban nelayan kedungrejo.

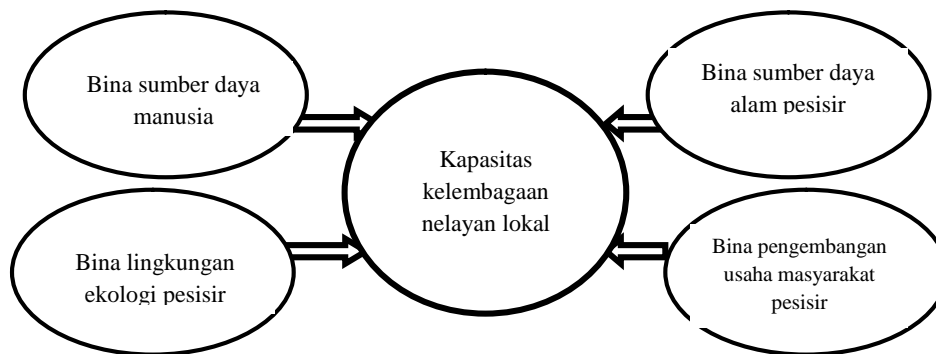
Dalam kenyataannya mayoritas nelayan pesisir (nelayan tradisional), nelayan kecil maupun nelayan penggarap, yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (*subsisten*), kecualipabrik dan perusahaan perikanan yang mana penangkapan ikan memang dilakukan untuk tujuan bisnis atau komersial dengan menggunakan kapal besar. Banyaknya jumlah nelayan kecil maupun nelayan tradisional yang melebihi kapasitas wilayah tangkapan ikan memicu potensi tangkap lebih (*over fishing*), hal ini dikarenakan jangkauan wilayah penangkapan nelayan kecil atau tradisional yang terbatas yang tidak sebanding dengan wilayah penangkapan. Pembahasan tentang nelayan khususnya nelayan kecil atau tradisional sangat terkait pula dengan sistem kerja mereka. Pada umumnya jam kerja mereka relatif singkat biasanya cukup satu hari saja (*one day fishing*). Kondisi atau kebiasaan semacam ini berdampak pada hasil tangkapan yang tidak optimal sehingga mengakibatkan tingkat produksi rendah dan pendapatan mereka juga tidak optimal akibatnya tingkat kesejahteraan nelayan pun rendah. Sistem kerja *oneday fishing* antara lain juga disebabkan kapal dan alat tangkap ikan yang mereka gunakan, selain itu budaya kerja yang hanya satu hari rupanya sudah menjadi kebiasaan. Di kawasan pesisir ini masih banyak dijumpai nelayan musiman, yakni nelayan yang melaut hanya pada saat tertentu saja, dan biasanya selain melakukan pekerjaan sebagai nelayan pada kondisi tertentu (musim paceklik) mereka melakukan pekerjaan lain, serta tingkat ketrampilannya mereka pun terbatas sehingga

berdampak pada tingkat perolehan mereka. Sistem Bagi Hasil dalam penangkapan ikan sangat berperan pula dalam menentukan tingkat pendapatan nelayan. Dalam sistem pembagian hasil penangkapan ikan pada umumnya diterapkan dengan sistem bagi hasil ini, nelayan pemilik (juragan) mendapatkan bagian hasil lebih banyak dari nelayan penggarap. Seperti di desa pesisir Muncar ini, sistem bagi hasil disini disebut dengan *umanan* (prosentase). Dalam setiap kapal yang melakukan penangkapan ikan terdapat satu pemilik (juragan) kapal yang ikut dalam penangkapan ikan. Sedangkan yang lainnya adalah nelayan penggarap atau Anak Buah Kapal (ABK) yang disebut dengan *kanca*. Dalam setiap kapal penangkapan ikan biasanya terdapat 25 ABK atau tergantung jenis kapal dan alat tangkap yang digunakan (untuk *payang* biasanya 10-15 ABK dan *cantrang* antara 10 ABK). Dalam sistem bagi hasil (*umanan*) penghasilan dibagi 40 s/d 50 *uman* (prosen) untuk juragandan sisanya dibagi untuk ABK. Jika ABK merangkap atau menduduki posisi atau jabatan tertentu, misalnya sebagai nahkoda atau juru pandu, maka dia mendapatkan tambahan *umanan* lagi, ABK yang merangkap sebagai juru pandu maka dia mendapatkan 1 *uman* untuk ABK dan 1 *uman* untuk posisi sebagai juru pandu. Pada prinsipnya setiap jabatan atau posisi ada bagian masing-masing sehingga kalau ABK merangkap jabatan, maka bagiannya akan bertambah pula. *Uman* dibagi dalam bentuk uang setelah dipotong pinjaman, selain pembagian dalam bentuk *uman* ABK mendapat bagian atau jatah '*iwak-iwakan*'. *Iwak-iwakan* ialah pembagian ikan dalam

jumlah yang selayaknya untuk dibawa pulang sebagai laupauk. Namun dalam prakteknya *iwak-iwak*-an ini oleh nelayan lebih banyak dijual daripada dibawa pulang untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketimpangan dalam sistem bagi hasil seperti ini nampaknya sudah menjadi tradisi atau budaya dan nampaknya kondisi seperti ini yang cenderung dilestarikan, nelayan pemilik modal atau pemilik (juragan) mendominasi para nelayan. Sementara nelayan (penggarap) tidak mempunyai pilihan. Dalam artikarena keterbatasan modal dan *skill* yang dimiliki oleh nelayan. Sistem perdagangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pesisir muncar yang tidak transparan, yang lebih banyak dikuasai oleh para tengkulak sehingga nelayan tidak ada pilihan. Di tengah kerasnya ekonomi pesisir ini ada peranan kelompok nelayan sebagai kumpulan nelayan pesisir Muncar adalah sebagai unit produksi nelayan, wahana kerja sama antar anggota kelompok atau antar kelompok dengan pihak lain. Tugas kelompok nelayan menjalin kerja sama dengan nelayan dan pelaku ekonomi pesisir lainnya serta sumber informasi dan teknologi, mendorong anggota berperan aktif dalam patembayan, keputusan merupakan kesepakatan bersama, menaati dan melaksanakan kesepakatan bersama dan, mengadakan pertemuan rutin. Tugas kelompok nelayan sebagai wahana kerja sama meliputi: (1) menciptakan iklim kerja sama yang baik, (2) menciptakan suasana keterbukaan, (3) mengatur pembagian tugas, (4) mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, (5) mengembangkan kader kepemimpinan, (6) mengadakan

pemupukan modal, dan (7) mengadakan hubungan melembaga dengan koperasi nelayan. Tumbuh dan kembangnya kelompok-kelompok nelayan dalam masyarakat tersebut pada umumnya didasarkan atas adanya kepentingan bersama, sedangkan kekompakan kelompok tergantung pada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu yang bergabung didalam kelompok. Faktor pengikat yang paling umum biasanya perasaan dan kesamaan yang bisa menciptakan keakraban dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memberikan keuntungan timbal balik. Kelompok nelayan pesisir Muncar ini merupakan suatu unit yang terdiri dari jumlah orang yang saling berinteraksi dan membentuk kelompok yang memiliki satu jenis usaha (penangkapan dan pemasaran, pengolahan, budidaya) serta memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan usaha perikanan. Keberhasilan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat ditentukan oleh desain dan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang holistik berpeluang lebih memberdayakan daripada pendekatan parsial. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan akan berdaya guna bila program dan kegiatannya disertai dengan perbaikan kondisi sumberdaya dan lingkungannya. Dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan, paling tidak mensyaratkan empat hal yakni pengembangan sumberdaya manusia, kesempatan berusaha, perbaikan pengelolaan sumberdaya dan perbaikan lingkungan yang dilakukan secara terpadu dan bersinergi, seperti yang diilustrasikan dalam gambar berikut

*Gambar 5. Sinergi kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir Muncar*



Sumber: artikulasi oleh peneliti

### E. Pemberdayaan masyarakat pesisir Muncar

*Stereotype* masyarakat pesisir muncar dalam mengatur dan mengelola wilayah dan masyarakatnya banyak menggunakan *power-structure* dalam manajemen keserasian dengan alam (laut). Bentuk manajemen tersebut antara lain tampak pada pembagian tugas, kerjasama kolateral (horizontal) dengan ketergantungan terhadap sesama (gotong royong) dan penguatan pada norma maupun nilai sosial yang berlaku di masyarakat ini. Aktivitas ekonomi di kawasan ini dalam pola pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang selama ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 pasal 1 yang berbunyi bahwa perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan, selai hal diatas, hal ini dibuktikan dengan adanya patembayan lokal nelayan kedungrejo muncar yang merupakan suatu organisasi/ perkumpulan nelayan dalam melakukan aktivitas ekonomi di pesisir. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Undang-

Undang Dasar 1945 menggunakan kata dikuasai sebagai legitimasi kewenangan negara atas sumberdaya alam dan lingkungan sehingga secara legalistik-formal, istilah dikuasai oleh Negara mengandung arti bahwa negara memiliki kewenangan secara atributif dalam pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, cakupan pengertian dikuasai negara antara lain penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui pemerintah (pusat) satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya termasuk bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam pengertian Pasal 33 UUD 1945, yang dimaksudkan dengan air, di samping air yang berada di daratan terlebih-lebih lagi yang berada di pesisir dan lautan. Kegiatan memberdayakan masyarakat Muncar dapat dengan menerapkan strategi terpadu adalah strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan karena memang dibutuhkan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat pesisir Muncar namun seiring dengan itu perlu dilakukan pula peningkatan kesejahteraan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat pesisir tersebut. Adapun untuk

implementasinya akan lebih baik apabila dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Dengan demikian maka akan tumbuh pula rasa memiliki terhadap hasil-hasil yang telah dicapai karena adanya partisipasi tersebut. Strategi terpadu ini pada dasarnya lebih menekankan pula kepada upaya pemberdayaan dengan sasaran akhir dari program berfokus kepada tumbuhnya kemandirian masyarakat sasaran secara bertahap. Meskipun sasaran akhirnya berupa peningkatan pendapatan, namun untuk menerapkan strategi ini yang pertama kali harus ditumbuhkan adalah adanya kesadaran tentang pentingnya penerapan nilai-nilai dalam masyarakat termasuk dalam menjalankan organisasi, menjaga kebersamaan, dan menumbuhkan kepedulian di antara sesama warga. Selain menerapkan strategi di atas, berbagai upaya pengembangan masyarakat

pesisirakan lebih efektif apabila dibarengi dengan pemeliharaan terhadap *social capital*, *Social capital* pada dasarnya mencakup institusi, hubungan, sikap, dan nilai yang mengarahkan dan menggerakkan interaksi antar orang untuk berkontribusi secara lebih produktif. Di pesisir muncar, pemanfaatan *social capital* pada umumnya masih didasarkan pada ikatan kekerabatan, kekeluargaan dan pertetanggaan, dalam hal ini *social capital* ini masih terbatas digunakan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek (tujuan konsumsi) bukan mengarah pada pemenuhan kebutuhan jangka panjang (tujuan produktif). Berdasarkan pada karakteristik sumberdaya alam dan kondisi sosial ekonomi yang adadi wilayah pesisir muncar, maka arahan alternatif strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Muncar yang dapat dilakukan dapat diilustrasikan pada skema tabel berikut seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. pengembangan ekonomi kewasan pesisir Muncar

No.	Komponen pelaku ekonomi	Kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat pesisir Muncar
1	nelayan ke nelayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membangun pusat penyuluhan di desa Kedungrejo Muncar</li> <li>• pemberdayaan masyarakat terhadap koperasi dengan sistem OVOP (one village one product) sehingga masyarakat desa kedungrejo muncar dan hinterland kawasannya memiliki produk pengolahan ikan unggulan</li> <li>• dalam patembayan dan organisasi nelayan dibuat peraturan ketat dalam hal tangkap dan lokasi penangkapan ikan agar tidak terjadi overfishing</li> </ul>
2	nelayan ke pemindangan dan pengasinan	adanya tempat pengepulan ikan di masing-masing desa untuk meningkatkan diversifikasi produk
3	nelayan ke cold storage	Adanya pengembangan tempat pengepul ikan yang dilengkapi dengan cold storage agar saat musim paceklik, cold storage masih menyimpan persediaan ikan beku
4	nelayan ke minyak ikan dan petis	Aglomerasi industri sebagai pemasok bahan baku dengan industri petis dan minyak ikan yang membuat perjanjian/kerjasama kontrak dalam memasok bahan bakun dan pemasaran



	nelayan ke pedagang	Pengembangan kawasan TPI untuk meningkatkan diversifikasi produk
5	pemindangan ke nelayan	Peminjaman alat tangkap pada nelayan yang sesuai dengan kebutuhan bahan baku pemindangan di sekitar pesisir dan TPI
6	pemindangan ke pemindangan	Aglomerasi industri pemindangan dengan pemindangan dalam mendapatkan bahan baku dan pemasaran untuk meningkatkan spesialisasi produk
7	Pemindangan ke pengasinan	Adanya tempat pemasaran seperti mina store khusus industri pemindangan dan pengasinan di desa tembokrejo pesisir muncar
8	Pemindangan ke cold storage	Penambahan 1 desa 1 cold storage sehingga saat terjadi overload cold storage dapat mengirimkan bahan baku ke pemindangan
9	Pemindangan ke pedagang	Diperlukan pusat pemasaran seperti mina store khusus yang membuat spesialisasi produk di kawasan pesisir
10	Pengasinan ke nelayan	Peminjaman fasilitas berupa alat tangkap pada nelayan sesuai kebutuhan bahan baku pengasinan di sekitar TPI
11	Pengasinan ke pemindangan	Adanya tempat pemasaran khusus seperti mina store industri 12 pengasinan dan pemindangan di desa-desa pesisir Muncar
12	Cold storage ke nelayan	Aglomerasi nelayan dan col storage dengan menerima ikan hasil tangkap nelayan meskipun kualitas rendah
13	Cold storage ke pemindangan dan pengasinan	Adanya pengepul dan cold storage masing-masing desa sehingga perolehan bahan baku langsung dari pusatnya
14	Cold storage ke cold storage	Peningkatan aglomerasi cold storage dengan cold storage dalam mendapatkan bahan baku dan wilayah pemasaran serta dalam penetapan harga

*Sumber : artikulasi oleh peneliti*

## **PENUTUP KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian analisis di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi proposisi dalam pluralitas ekonomi masyarakat pesisir Muncar Banyuwangi, berikut:

1. Mainstream tipologi masyarakat desa pesisir Muncar terdiri dari beragam etnis beberapa diantaranya merupakan komunitas masyarakat Madura, Osing, Jawa dan etnis Tionghoa. Kelompok masyarakat tersebut memiliki budaya ekonomi yang berbeda yang dipengaruhi oleh pranata dan norma, *power structure*, tacit knowledge masyarakat terhadap lingkungan pesisir dan laut, hal itu mengindikasikan bahwa

masyarakat tersebut telah menjadi bagian masyarakat yang pluralistik tapi masih tetap memiliki budaya kebersamaan, artinya struktur masyarakat pesisir ini merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan yang multi etnis. Struktur masyarakat yang plural ini membentuk sistem nilai yang merupakan akulturasi sosial dan budaya dari masing-masing komponen dalam struktur masyarakatnya.

2. karakteristik sosial masyarakat nelayan pesisir Muncar dilihat dari perilaku transendentalnya bahwa pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan umumnya didapat dari warisan

- orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris.
3. Kelembagaan lokal masyarakat pesisir Muncar merupakan adanya paguyuban dan patembayan lokal nelayan desa pesisir yang ditandai dengan penguatan asosiasi koperasi nelayan yang berbasis pada komunalitas yang tumbuh secara alami melalui kegiatan-kegiatan gotong royong diantara masyarakat. Basis utama penguatan model koperasi seperti ini adalah adanya sikap egalitarianisme dan saling kepercayaan (trust) diantara anggotanya. Melalui modal inilah kemudian asosiasi nelayan tumbuh dan berkembang menjadi koperasi nelayan kedungrejo yang mengangkat pengurus secara demokratis melalui rembuk kelompok. Kelembagaan lokal disini juga dicirikan adanya patembayan atau paguyuban nelayan kedungrejo
  4. pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Muncar dilakukan dengan strategi terpadu yang lebih menekankan kepada upaya pemberdayaan dengan sasaran akhir dari program berfokus kepada tumbuhnya kemandirian masyarakat sasaran secara bertahap. Meskipun sasaran akhirnya berupa peningkatan pendapatan, namun untuk menerapkan strategi ini yang pertama kali harus ditumbuhkan adalah adanya kesadaran tentang pentingnya penerapan nilai-nilai dalam pasal 33 UUD 1945 dalam masyarakat termasuk dalam menjalankan organisasi, menjaga kebersamaan, dan menumbuhkan kepedulian diantara sesama warga. Selain menerapkan strategi di atas, berbagai upaya pengembangan

masyarakat pesisirakan lebih efektif apabila dibarengi dengan pemeliharaan terhadap *social capital*.

### REKOMENDASI

Perlu sinkronisasi dan kepastian hukum kelembagaan lokal patembayan nelayan kecil atau nelayan tradisional supaya tidak terjadi perbedaan interpretasi penguasaan wilayah hasil tangkap ikan yang menyebabkan konflik nelayan kalangan atas dan nelayan kalangan bawah.. Jaminan perlindungan hukum dan pemberdayaan nelayan sangat diperlukan dan harus senantiasa ditingkatkan sebagai upaya penguatan nelayan sebagai salah satu sumber daya manusia Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Perlu strategi peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Muncar dengan strategi terpadu yang lebih menekankan kepada upaya pemberdayaan dengan sasaran akhir dari program berfokus kepada tumbuhnya kemandirian masyarakat sasaran secara bertahap, namun untuk menerapkan strategi ini yang pertama kali harus ditumbuhkan adalah adanya kesadaran tentang pentingnya penerapan nilai-nilai dalam pasal 33 UUD 1945 dalam masyarakat termasuk dalam menjalankan organisasi, menjaga kebersamaan, dan menumbuhkan kepedulian diantara sesama warga.

### DAFTAR RUJUKAN

- Awan, Rudyanto. *www.bappenas.go.id*. [Online]. 2014. [Cited Oktober 30, 2012.]  
<http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/3009/>.
- Dahuri, Kay. 2005. *Modul Sosialisasi dan Orientasi*

- Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan
- Karsidi, Ravik. 2001. *Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Dalam Pambudy dan A.K. Adhy (ed.): *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*, Bogor: Penerbit Pustaka Wirausaha Muda.
- Korten, David C. 1984. *Pembangunan yang Memihak Rakyat*. Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan.
- Moustakas, Clark. 1994. *Phenomenological Research Methods*. California: SAGE Publications
- Nurjaya, I Nyoman, 2009, *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil, Demokratis dan Berkelanjutan: Perspektif Hukum dan Kebijakan, dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Sasono, Adi, 1999. *Ekonomi Kerakyatan dalam Dinamika Perubahan*, Makalah Konferensi Internasional Ekonomi Jaringan, Hotel Sangri La, Jakarta 5-7 Desember